

**Shopee**

# HANDPHONE & AKSESORIS

Dapatkan diskon spesial untuk berbagai produk Handphone & Aksesoris agar tampil keren dan percaya diri setiap hari!

<p><b>Samsung Galaxy A06 4/64GB Light Blue</b> ... Rp1.549.000 <b>Rp1.269.000</b> BELI SEKARANG</p>	<p><b>Xiaomi Redmi Pad 2 (4/128G)   11" 2.5...</b> Rp3.999.000 <b>Rp1.999.000</b> BELI SEKARANG</p>	<p><b>Xiaomi Redmi Buds 6 Play   Bluetooth 5.4 ...</b> Rp129.000 <b>Rp118.000</b> BELI SEKARANG</p>
---	---	---

Baca berita tanpa iklan. [Gabung Kompas.com+](#)

**KOMPAS.com**

## 80 DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

**Kampung Lorong Merah Putih Bermunculan di Tasikmalaya, Bendera Jumbo Ratusan Meter...**

**Semarak HUT Ke-80 RI, Warga Bangkalan Adu Cepat Tangkap Bebek dengan Mata Tertutup**

**4 Gunung di Indonesia yang Tutup Pendakian Saat 17 Agustus 2025**

Kompas.com / Tren



**Aris Setiawan**

Dosen

Etnomusikolog, Pengajar di Jurusan Etnomusikologi dan Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI).

# Rahunya Royalti Musisi Tradisi

Kompas.com - 06/08/2025, 09:06 WIB



Kelompok musik Krontjong Toegoe tampil dalam pentas malam apresiasi budaya ?Krontjong Toegoe dari Masa ke Masa? di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (16/1/2014). Pentas ini sebagai bentuk apresiasi untuk musik keroncong yang kian terpinggirkan. (KOMPAS/IWAN SETIYAWAN)



**KECIL-KECIL CABE RAWIT!**

**BIAR TIPIS, LAPTOP INI TANGGUH BUAT KERJA & KULIAH**

**CEK ULASANNYA DI SINI**

Baca berita tanpa iklan. [Gabung Kompas.com+](#)

Hizbullah Kirim Peringatan! Ancam Tembak Rudal ke Israel, jika...



Mutasi Polri: Fadil Imran Jadi Asisten Utama Kapolri, Irje...  
Video  
3 jam lalu



bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Daftar di sini Kirim artikel

Editor: Sandro Gatra

INDUSTRI musik Indonesia sedang dilanda polarisasi tajam terkait regulasi royalti *performing rights*, yang memicu terbentuknya dua kubu berseberangan dengan kepentingan berbeda.

Di satu sisi berdiri Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), didirikan pada Juli 2023, oleh musisi ternama seperti Ahmad Dhani dan Piyu (Padi). Mereka memperjuangkan hak ekonomi pencipta lagu.

Di sisi lain, muncul Vibrasi Suara Indonesia (VISI), diinisiasi oleh Ariel Noah, Armand Maulana, Rossa dan puluhan musisi papan atas lainnya. Mereka membela kepentingan para pelaku pertunjukan (*performers*).

Akar konflik ini bermula dari penafsiran berbeda terhadap UU Hak Cipta No 28/2014, khususnya mengenai kewajiban pembayaran royalti setiap kali sebuah lagu dibawakan secara komersial.

AKSI bersikukuh bahwa pencipta lagu harus memiliki kontrol penuh atas karya mereka dan berhak menetapkan syarat penggunaan, termasuk besaran royalti.

Mereka mendorong sistem Digital Direct License (DDL) yang memungkinkan pencipta lagu mengatur royalti secara mandiri tanpa perantara.

Indonesia Maju menurut saksi sejarah. Simak dalam Kompas 80 Tahun Indonesia. Pre-order sekarang!

Baca juga: Perang Royalti di Era Musik Generatif AI

Sementara VISI berargumen bahwa aturan existing terlalu membebani penyanyi dan musisi yang rutin membawakan lagu orang lain dalam pertunjukan.

Mereka menginginkan penyederhanaan prosedur di mana pembayaran royalti bisa dilakukan tanpa perlu izin khusus dari pencipta lagu, asalkan melalui lembaga resmi.

Perseteruan ini memanasi setelah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Februari 2025, yang memenangkan pencipta lagu Ari Bias dalam gugatan terhadap Agnez Mo.

Penyanyi papan atas itu diharuskan membayar ganti rugi Rp 1,5 miliar karena membawakan lagu *Bilang Saja* dalam konser komersial tanpa izin.

Putusan ini dianggap VISI sebagai ancaman kebebasan berekspresi musisi, sementara bagi AKSI merupakan kemenangan penting bagi perlindungan hak cipta.

Kasus ini menjadi pemicu bagi VISI untuk mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi pada Maret 2025, menuntut revisi lima pasal dalam UU Hak Cipta yang mereka anggap tidak adil bagi *performers*.

Di tengah hiruk-pikuk perseteruan antara musisi pop elite ini, nasib musisi tradisi justru terabaikan sama sekali.

Mereka tidak memiliki wakil dalam kedua asosiasi tersebut, padahal karya-karya mereka rentan dieksploitasi tanpa kompensasi.

Berbeda dengan musisi pop yang memiliki *bargaining position* kuat, musisi tradisi umumnya tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum memadai.

Karya-karya mereka yang diwariskan turun-temurun justru sering diambil alih dan dikomersialisasi pihak lain tanpa imbalan.

### Nasib musisi tradisi

Regulasi hak cipta yang menjadi bahan perdebatan AKSI-VISI ternyata tidak menyentuh perlindungan bagi musik tradisi.

UU Hak Cipta memang mengakui ekspresi budaya tradisional, tetapi tidak menyediakan mekanisme konkret untuk melindungi hak ekonomi

Israel Berencana Duduki Gaza Sepenuhnya, Apa...  
Video  
4 jam lalu

Didesak AS, Pemerintah Lebanon Siap Luc...  
Video  
5 jam lalu

Istana Gkgap Prabowo Tak Masalah dengan...  
Video  
5 jam lalu

Lihat Semua >

### Terpopuler

- 1 Viral Video Pemilik Porsche Maafkan Sopir Truk yang Serempet Mobilnya, Rugi...
- 2 Sound Horeg ala Korsel Dibongkar demi Redakan Ketegangan dengan Korut
- 3 6 Fakta Kasus Silfester Matutina Fitnah Jusuf Kalla, Siap Jalani Hukuman
- 4 Perbandingan Orang Terkaya Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Vietnam: Prajogo...
- 5 Siapa Komjen Dedi Prasetyo, Wakapolri Baru yang Pernah Raih Rekor MURI?

Shopee

**PRODUCT PILIHAN UNTUKMU**

Dapatkan diskon spesial untuk berbagai Product Pilihan Untukmu!

**PROMO**

Sheba Pouch Makanan Kucing Basah 70 gr

20% lebih murah

BELI SEKARANG

Baca berita tanpa iklan. [Gabung Kompas.com+](#)

### Now Trending



Indonesia Banjir Panggilan Spam, Tertinggi Se-Asia Pasifik

mengalir ke pemilik aslinya.

Baca juga: [Di Balik Konflik Royalti, AI Siap Mencuri](#)

Kondisi ekonomi musisi tradisi pun jauh berbeda dengan rekan mereka di industri pop. Jika musisi pop bisa mengandalkan royalti dari streaming dan hak cipta, musisi tradisi bergantung pada penghasilan tidak tetap dari pertunjukan lokal.

Mereka jarang memiliki kontrak resmi, dan ketika karyanya dipakai di tempat lain, hampir mustahil menuntut kompensasi. Sistem yang ada sama sekali tidak memihak mereka.

Masalah dokumentasi memperparah keadaan. Banyak karya tradisi tidak tercatat secara resmi, sehingga sulit dibuktikan kepemilikannya.

Sementara lagu pop modern memiliki catatan hak cipta yang jelas, musik tradisi justru diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal ini membuat klaim hukum menjadi sangat sulit ketika terjadi pelanggaran hak cipta.

Ketimpangan ini semakin jelas ketika melihat perbandingan sumber pendapatan. Musisi pop seperti anggota AKSI atau VISI bisa mendapatkan royalti dari berbagai *channel* - mulai dari radio, streaming, hingga pertunjukan langsung.

Sementara musisi tradisi hanya mengandalkan pertunjukan langsung, itupun dengan bayaran yang seringkali tidak sebanding dengan nilai seni yang mereka sajikan.

Upaya perlindungan sebenarnya sudah diamanatkan dalam UU Hak Cipta, khususnya Pasal 38 tentang ekspresi budaya tradisional.

Namun, implementasinya masih sangat lemah. Tidak ada lembaga khusus yang menangani pendataan dan perlindungan karya tradisi, berbeda dengan LMKN yang identik mengurus royalti musik pop.

Akibatnya, tidak ada mekanisme standar untuk mengklaim hak ketika karya tradisi digunakan secara komersial.

Beberapa kasus pembajakan musik tradisi sebenarnya sudah mencuat ke permukaan. Sejumlah lagu daerah pernah dipakai dalam iklan komersial tanpa izin, atau diaransemen ulang tanpa memberi kredit kepada sumber aslinya.

Baca juga: [Jalur Non-Pidana Menyelesaikan Konflik Hak Cipta](#)

Namun, karena tidak ada payung hukum yang kuat, pelanggarnya jarang sekali mendapat sanksi. Berbeda dengan kasus musik pop di mana pelanggar hak cipta bisa digugat hingga miliaran rupiah.

Pemerintah dituntut menyusun regulasi yang lebih baik. Perlindungan hak cipta seharusnya tidak hanya untuk musisi pop, tetapi juga untuk seluruh elemen musik Indonesia, termasuk tradisi.

Tanpa kebijakan yang jelas, eksploitasi terhadap musik tradisi akan terus berlanjut tanpa konsekuensi hukum. Musisi tradisi perlu dilibatkan dalam pembahasan kebijakan terkait hak cipta.

Selama ini, diskusi selalu didominasi oleh musisi pop dan pelaku industri modern. Padahal, musik tradisi merupakan bagian penting dari identitas musik Indonesia.

Jika terus diabaikan, bukan tidak mungkin kekayaan musik tradisional kita akan tergerus oleh komersialisasi tanpa kontrol.

Pendidikan hukum bagi komunitas tradisi menjadi kebutuhan mendesak. Banyak seniman tradisi yang tidak memahami cara melindungi karya mereka secara legal.

Pelatihan tentang pendaftaran hak cipta dan mekanisme klaim royalti bisa menjadi langkah awal untuk memberdayakan mereka. Solusi teknis seperti pendataan digital karya tradisi perlu segera diwujudkan.

Dengan membangun database nasional yang komprehensif, klaim kepemilikan akan lebih mudah dibuktikan. Sistem ini juga akan memudahkan pihak yang ingin menggunakan musik tradisi secara legal untuk membayar kompensasi yang pantas.

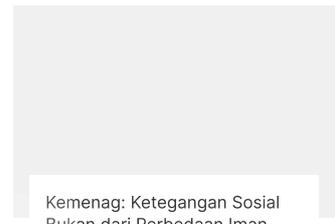
Pembentukan lembaga khusus pengelola hak ekonomi musisi tradisi harus menjadi prioritas. Lembaga  kerja sama dengan komunitas lokal dan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi royalti berjalan adil.



Gelak Tawa di Jagat Literasi, Siswa SD di Klaten Ditanya Merbabu, Jawabnya Roblox



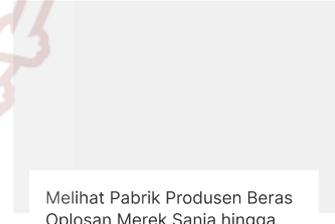
Kembali ke Tanah Air, 2 Dokter UB Ungkap Kondisi di Gaza: Kelaparan, Trauma, dan Kehancuran



Kemenag: Ketegangan Sosial Bukan dari Perbedaan Iman, tapi Kurangnya Ruang Dialog



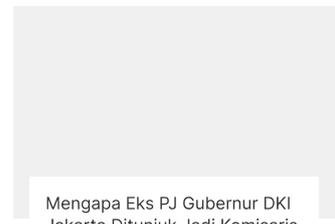
18 Agustus 2025 Termasuk Cuti Bersama atau Libur Nasional?



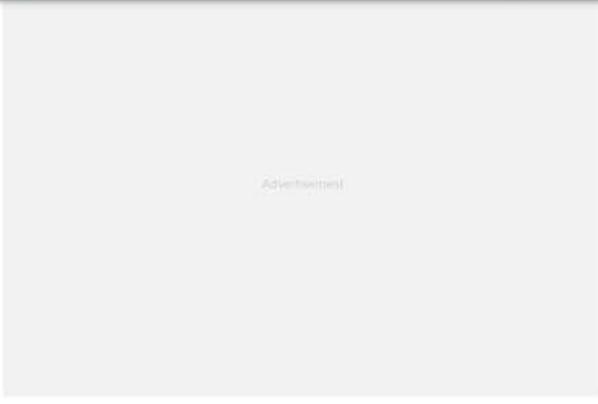
Melihat Pabrik Produsen Beras Oplosan Merek Sania hingga Fortune...



Usai Damai dengan Konsumen, Driver Grab di Jambi Malah Diputus Mitra: Saya Merasa Dibohongi



Mengapa Eks PJ Gubernur DKI Jakarta Ditunjuk Jadi Komisaris Utama Food Station?



Industri musik Indonesia tidak akan utuh tanpa keberadaan musik tradisi. Jika polemik royalti hanya berfokus pada konflik kepentingan musisi pop, maka kesenjangan akan semakin melebar.

Musisi tradisi berhak mendapat perlindungan yang setara agar bisa terus berkarya tanpa khawatir dieksploitasi.

Momentum perdebatan AKSI-VISI menjadi kesempatan untuk mengevaluasi ulang seluruh sistem perlindungan hak cipta musik di Indonesia.

Kebijakan yang dibuat harus mampu melindungi semua lapisan musisi, dari yang bermain di industri musik pop hingga yang melestarikan tradisi. Hanya dengan pendekatan setara, keadilan bagi seluruh pelaku musik Indonesia bisa terwujud.

*Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : <https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D>. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.*



Berikan Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE

Tag royalti Musik tradisional Musisi Tradisi

**Lihat Tren Selengkapnya**

**Pilihan Untukmu**



**Mungkin Anda melewatkan ini**

- 6 Fakta Kasus Silfester Matutina Fitnah Jusuf Kalla, Siap Jalani Hukuman
- Daftar Maskapai dengan Awak Kabin Terbaik Dunia 2025, Garuda Indonesia...
- [POPULER TREND] Apa yang Dirasakan di Hari Terpendek 5 Agustus...
- Mutasi Polri Terbaru, Komjen Dedi Prasetyo Jadi Wakapolri, Siapa Lainnya?
- Siapa Komjen Dedi Prasetyo, Wakapolri Baru yang Pernah Raih Rekor...

Close Ads